KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sekjen DPR Antar UU IKN ke Sekretariat Negara
Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Sekjen DPR Antar UU IKN ke Sekretariat Negara

SEKRETARIS Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengantar draf UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Sekretariat Negara. UU tersebut diterima Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemarin.

"Ketua DPR menugaskan Sekjen DPR untuk menyerahkan UU IKN kepada Presiden melalui Mensetneg sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Batas waktunya tujuh hari dan hari ini batas tujuh harinya," ujar Indra.

Menurut Indra, sebelum diserahkan kepada pemerintah, UU tersebut sudah lengkap dengan isi 11 bab dan 44 pasal. DPR pun menyerahkan langkah selanjutnya kepada pemerintah. "Sesuai undang-undang dasar, pemerintah diberi waktu 30 hari untuk mengkaji," beber Indra.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR pada 18 Januari lalu sudah memutuskan RUU IKN menjadi undang-undang. Seluruh fraksi menyetujui, kecuali Fraksi PKS. Nantinya setelah melalui proses kajian, undang-undang itu akan dinomori dan masuk dalam lembaran negara.

Khusus untuk kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. "Tapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Basuki Tjahaja Purnama. Dia juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto.

Pengamat politik sekaligus peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kepastian hukum dan digitalisasi agar tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis berskala global setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. "Jadi, kalau DKI ingin mendeklarasikan sebagai kota global, itu dipastikan bahwa kita memiliki daya saing tinggi, dipastikan hukum memiliki kepastian."

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mendorong pembenahan domestik untuk menyongsong Jakarta menjadi kota global untuk ekonomi dan bisnis. Meski begitu, Siti meyakini tanpa perlu dideklarasikan pun, Jakarta sudah menjadi barometer ekonomi dan bisnis.

Bukan hanya soal penegakan hukum, digitalisasi juga perlu digenjot untuk mendukung birokrasi yang efisien.

Untuk itu, ia mendukung DKI Jakarta mengoptimalkan digitalisasi, di antaranya menguatkan proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi (IT), meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) berinteraksi dengan IT, dan memastikan data dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan IT. (Pra/Ant/P-1)